

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Langkah awal untuk menerapkan demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan pemilihan umum yang bersifat LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur, dan adil) . Pemilihan umum di Indonesia dibagi menjadi dua bagian berdasarkan lokasinya. Ada pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan ada juga pemilihan yang dilaksanakan di daerah untuk memilih kepala daerah yang dikenal dengan pilkada. Adanya pemilihan umum ini mempunyai sebuah tujuan untuk memberikan kesempatan luas kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan Indonesia dan juga dapat memilih pemimpin baik Presiden ataupun Kepala Daerah yang dianggap berkompenten.

Akan tetapi, tidak dapat dihindari juga bahwa dengan adanya pemilu juga bisa membuat peluang untuk menghadirkan praktik dinasti politik yang bermain rapih oleh sebuah elit ‘pertahana’ dengan modal ‘nama’ dan ‘reputasi’. Inilah yang akan menjadi sebuah kekhawatiran yang merusak citra dari demokrasi itu sendiri oleh adanya praktik dinasti politik ini (Susanti, 2017). Dampak dari demokratisasi lokal di Indonesia telah menciptakan dua realitas yang kontras dalam pelaksanaan demokrasi di

Indonesia. Di satu sisi, pemilu langsung mencerminkan kedaulatan rakyat dan nilai-nilai demokrasi dengan memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara dalam hal partisipasi politik, baik dalam pemilihan maupun pencalonan. Namun di sisi lain, dinasti politik merupakan aspek lain dari demokratisasi yang dianggap sebagai ancaman terhadap hakikat demokrasi (Irham,2016). Dinasti politik dipandang berpotensi merusak kualitas demokrasi dengan membatasi munculnya pemimpin yang bisa dianggap berkualitas dan bahkan membuka pintu bagi munculnya kekuatan otoriter baru (Hidayati,2014).

Dewasa ini, seiring dinamika politik di Indonesia yang semakin berkembang, turut pula jumlah praktik dinasti politik yang semakin bertambah. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Indonesia pada tahun 2015 hingga 2018, menjelaskan bahwa terjadi lonjakan besar dinasti politik di Indonesia. Pada pilkada serentak 2015, terdapat 35 kepala daerah yang berhasil memenangi kontes pilkada serentak hasil dari dinasti politik, 33 pada tingkat kabupaten/kota dan dua kepala daerah di tingkat provinsi. Selanjutnya, di pilkada 2017 serentak, terdapat 17 kepala daerah yang menang pilkada hasil dari dinasti politik. 12 kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dan lima kepala daerah pada tingkat provinsi. Di pilkada serentak 2018 juga terdapat 34 yang menang hasil dari dinasti politik. 26 kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dan tujuh kepala daerah di tingkat provinsi. Sehingga selama 3 kali melaksanakan pilkada serentak ini total daerah dari total 541 wilayah, ada 80 wilayah dengan

persentase sekitar 14,78% yang melakukan praktik dinasti politik. (Republika.CO.ID, 2020)

Pada tahun 2018 sebanyak 16 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat mengikuti pilkada serentak 2018. Yaitu pada Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Banjar. (Detik.Com, 2018)

Salah satu kabupaten yang mengikuti kontestasi pilkada serentak 2018 di Jawa Barat adalah Kabupaten Kuningan. Pada pilkada 2018 di Kabupaten Kuningan ada 3 calon yang berkontestasi memperebutkan kursi jabatan tertinggi Kabupaten Kuningan. Pada pasangan nomor satu, diikuti oleh Toto Taufikrohman Kosim dan Yosa Octora Santono yang diusung oleh Partai PKS, PPP, Demokrat, dan PKB. Pasangan nomor urut dua, diikuti oleh Dudy Pamuji dan Udin Kusnedi. Pasangan Dudy-Udin ini diusung oleh Partai Gerindra, Golkar dan Partai PAN. Pasangan nomor urut 3 diikuti oleh Acep Purnama dan Muhammad Ridho Suganda. Acep Purnama merupakan seorang Wakil Bupati Kuningan pada periode 2013-2018, Pasangan Acep-Ridho ini diusung oleh Partai PDIP dan Partai Nasdem (Pikiran Rakyat, 2018).

Terdapat satu yang menarik pada Pilkada di Kabupaten Kuningan tahun 2018 yaitu berkaitan dengan isu dinasti politik yang secara tidak langsung

para pasangan calon kepala daerah Kabupaten Kuningan mempunyai *background* hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan para elit politik pada level lokal dan nasional. Seperti contoh pada pasangan urutan nomor satu, diketahui bahwa Yosa Octora Santono merupakan anak dari elit lokal yang juga menjadi Anggota DPR RI yaitu H. Amin Santono S.Sos (Kuningan Mass, 2017). Kemudian pada pasangan nomor 3 yaitu ada nama Muhammad Ridho Suganda yang merupakan anak dari Bupati Kuningan sebelumnya yaitu Aang Hamid Suganda dan Utje Ch Suganda (Kompas, 2018).

Status Muhammad Ridho Suganda yang merupakan anak dari dua bupati sebelumnya, menimbulkan pandangan berbeda dari para pemilih. Di satu sisi Aang Hamid Suganda sengaja mengajukan anaknya kepada partai PDIP untuk menjadi pasangan dari Acep Purnama agar bisa melanggengkan kekuasaannya dengan trah Sugandanya sehingga ia masih bisa ikut mempengaruhi kebijakan yang diambil apabila pasangan Acep-Ridho terpilih. Di sisi lainnya, ada anggapan pemilih yang menganggap Ridho ini memang pantas menjadi wakil bupati dikarenakan mempunyai integritas dan pendidikan tinggi, serta aktif di organisasi yang dipimpinya (Kuningan Mass, 2018).

Pada pilkada Kabupaten Kuningan tahun 2018 ini dimenangkan oleh pasangan nomor urutan 3, yaitu Acep Purnama dan Mohammad Ridho Suganda. Berdasarkan data yang didapat dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Kuningan, pasangan Acep-Ridho berhasil memperoleh suara

sebanyak 233.539 (40,8%) suara, dengan berhasil menang di 26 Kecamatan dari 32 Kecamatan di Kuningan, serta mendapatkan suara terbanyak di Kecamatan Kuningan (24.039) dan terendah pada Kecamatan Japara (3.758). Pasangan Acep-Ridho mengalahkan pasangan Toto-Yosa 183.156 (32,1%) dan Dudy-Udin 155.017 (27,1%). (KPU Kabupaten Kuningan).

Kemenangan pasangan Acep-Ridho ini dalam Pilkada Kabupaten Kuningan tahun 2018 ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun kepemimpinan Kabupaten Kuningan ini dipimpin oleh keluarga Aang Hamid Suganda. Perwujudan dinasti politik di Kabupaten Kuningan dimanifestasikan dengan adanya hubungan keluarga langsung dengan pemimpin daerah sebelumnya. Dua periode dipimpin oleh Aang Hamid Suganda (2003-2008) dan (2008-2013), kemudian Utje Ch Suganda (2013-2018), dan sekarang Mohammad Ridho Suganda (2018-2023).

Kemudian, selain adanya hubungan kekuasaan yang berlanjut, salah satu indikator terjadinya dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Kuningan ialah penempatan anggota keluarga/kerabat dari keluarga Aang Hamid Suganda ke jabatan fungsional di pemerintahan Kabupaten Kuningan. Sebelumnya Utje Hamid Suganda, sebelum menjadi Bupati Kuningan beliau pernah ditempatkan sebagai ketua PMI Kabupaten Kuningan dan juga pernah menjabat sebagai ketua K3S (Koordinator Kegiatan Kesejahteraan) di Kabupaten Kuningan. Kemudian ada Dian Rachmat Yanuar yang merupakan kerabat dekat dari Aang Hamid Suganda. Sebelum menjadi Sekda Kabupaten Kuningan sekarang, Dian pernah menduduki

jabatan sebagai Kabag Humas di Setda Kabupaten Kuningan pada masa pemerintahan Aang Hamid Suganda.

Keberhasilan mempertahankan kekuasaan ini, tentunya tidak lepas dari dukungan yang didapatkan oleh simpatisan pendukung pertahana sebelumnya. Artinya, pada situasi ini Aang Hamid Suganda selama menjabat sebagai Bupati Kuningan telah berhasil membuat simpatisan dan tetap mampu menjaga untuk mendukung keluarga dari Aang Hamid Suganda dalam bentuk apapun. Salah satu bukti ialah ketika pendukung atau simpatisan dari Aang Hamid Suganda membentuk Relawan AHAS (Aang Hamid Suganda) Center untuk memenangkan pilkada Kabupaten Kuningan di tahun 2015 dan terakhir di 2018. Anggota Relawan AHAS ini terdiri dari pentolan partai, tokoh masyarakat, serta tokoh agama yang sudah lama menjadi pendukung setia dari Aang Hamid Suganda (Kuningan Mass, 2018).

Dari fenomena yang terjadi di Kabupaten Kuningan, terdapat argumentasi bahwasannya salah satu bentuk dari dinasti politik ialah awalnya merupakan milik pemerintahan sang suami kemudian ketika masa jabatannya habis, digantikan oleh sang istri hingga dilanjutkan oleh sang anak pada pemerintahan sekarang. Hal ini menunjukkan bahwasanya sang suami sebagai kepala daerah ini telah berhasil membuat jaringan kekuasaan hingga bisa dilanjutkan dengan baik oleh istri dan anaknya untuk mengemban jabatan kepala daerah selanjutnya.

Keberagaman masyarakat Kabupaten Kuningan bisa dilihat dengan pilihan politiknya. Pemilih pada umumnya mempunyai penilaian atau pandangan yang berbeda antar satu sama lain. Pandangan yang berbeda ini dikarenakan adanya suatu proses persepsi. Persepsi menurut Rakhmat Jalaluddin (2007) merupakan pengalaman mengenai peristiwa atau hubungan yang didapatkan dengan menyimpulkan suatu pesan setelah dimaknai pesan tersebut. Nantinya ketika persepsi sudah dibuat di dalam diri masyarakat, akan hadir dua persepsi yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Dalam konteks politik, persepsi akan menimbulkan reaksi dan pandangan bagi individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Adanya reaksi dan pandangan ini akan memunculkan pengaruh dalam menentukan pilihan politiknya (Yendra, 2023).

Setelah melihat penjabaran di atas mengenai sebuah peristiwa dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Kuningan, penulis memiliki ketertarikan dari dinasti politik yang dijalankan oleh keluarga Aang Hamid Suganda lewat proses Pilkada Kabupaten Kuningan, diantaranya adalah :

1. Kemenangan yang diraih oleh Acep-Ridho dalam Pilkada Kabupaten Kuningan Tahun 2018 yang mengabsahkan dinasti politik sudah berjalan lama di Kabupaten Kuningan dan langgengnya kekuatan politik dari Aang Hamid Suganda yang sudah berlangsung lama.
2. Kecamatan Kuningan yang menjadi penyumbang suara terbanyak dalam kemenangan Acep-Ridho pada pilkada Kabupaten Kuningan

2018, memunculkan persepsi masyarakat di Kecamatan Kuningan yang secara tidak langsung melanjutkan kembali dinasti politik di Kabupaten Kuningan.

Dua hal diatas menjadi sebuah alasan penulis tertarik mengambil penelitian terhadap dinasti politik yang ada di Kabupaten Kuningan. Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis akan melakukan sebuah penelitian yang nantinya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Kecamatan Kuningan Terhadap Terbentuknya Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas mengenai dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Kuningan, maka rumusan masalah yang penulis angkat ialah Bagaimana persepsi masyarakat di Kecamatan Kuningan terhadap dinasti politik di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui permasalahan yang tertuang di dalam rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk bisa mengetahui dan menganalisis bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Kuningan terhadap terbentuknya dinasti politik pada pilkada Kabupaten Kuningan tahun 2018.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi masyarakat Kecamatan Kuningan terhadap terbentuknya dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan wawasan dan bacaan bagi para pembaca mengenai bagaimana pola persepsi masyarakat Kecamatan Kuningan terhadap terbentuknya dinasti politik di Kabupaten Kuningan. Selain itu juga diharapkan bisa digunakan oleh para akademisi atau para peneliti lainnya sebagai bahan referensi tentang dinasti politik yang terjadi dalam ruang lingkup Kabupaten, tepatnya di Kabupaten Kuningan. Terakhir, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik Universitas Siliwangi.

Dalam menyusun penelitian ini, dibutuhkanlah sebuah tinjauan penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Di sini penulis, telah melakukan menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis untuk nantinya dijadikan sebagai referensi. Berikut adalah perbandingan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis :

Untuk yang pertama, penelitian dari Ilham Ramadhan (2018) yang berjudul Politik Dinasti di Aceh (Studi Kasus Kabupaten Nagan Raya) ini membahas mengenai dinasti keluarga Ampon Bang atau H.T Zulkarnain yang berada di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Ampon Bang telah menjabat

menjadi Bupati Nagan Raya selama 15 tahun lamanya. Terhitung sejak menjabat menjadi Penanggung Jawab Bupati pada tahun 2002 hingga 2006. Setelah masa jabatan menjadi PJ Bupati selesai, Ampon Bang mencalonkan diri menjadi Bupati Nagan Raya pada pilkada pertama pada tahun 2007 dan menang, kemudian mengikuti kembali di pilkada kedua pada tahun 2012. Dinasti politik yang dibangun oleh Ampon Bang dengan cara menempatkan anggota keluarga dan kerabatnya untuk duduk di jabatan birokrat di Kabupaten Nagan Raya. Kemudian membantu adiknya untuk maju dan memenangkan pilkada tahun 2017 di Nagan Raya. Penelitian dari Ilham Ramadhan ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data yang dipilih oleh Ilham Ramadhan mengambil metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi kepustakaan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ilham Ramadhan (2018) dengan penulis yang dilakukan adalah, meneliti praktik dinasti politik yang dilakukan oleh satu keluarga, yang sama-sama dikenal dan berhasil dengan pembangunan daerahnya. Perbedaan penelitiannya adalah penelitian dari Ilham Ramadhan ini membahas mengenai strategi ketika dan sesudah Ampon Bang menjabat untuk membangun dinasti politik di Kabupaten Nagan Raya. Sementara di sini penulis akan menyoroti bagaimana persepsi dari masyarakat Kecamatan Kuningan terhadap pilkada Kabupaten Kuningan tahun 2018. Kemudian objek penelitian yang diteliti oleh Ilham Ramadhan berada di Kabupaten Nagan Raya, sementara objek penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Kabupaten Kuningan.

Untuk yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Novendra Bimantara dalam jurnal yang berjudul Analisis Politik Dinasti Di Kabupaten Kediri. Penelitian ini membahas mengenai asal muasal dinasti politik di Kabupaten Kediri yang dijalankan oleh keluarga Sutrisno. Sepak terjang keluarga Sutrisno dalam membangun dinasti politik ini dimulai ketika era reformasi diterapkan di Indonesia, tepatnya ketika tahun 1999. Pada tahun 1999, dimana pilkada belum dipilih langsung oleh rakyat, Sutrisno dipilih oleh DPRD Kabupaten Kediri untuk menjadi Bupati Kediri dikarenakan sepak terjang yang dimiliki oleh Sutrisno, terutama di bidang Pertanian. Kemudian di tahun 2004 Sutrisno kembali memenangkan Pilkada Kabupaten Kediri dan menjadi titik awal kekuasaan Sutrisno di Kabupaten Kediri. Selanjutnya di Pilkada tahun 2009 dan 2015, istri dari Sutrisno yang bernama Haryati terpilih menjadi Bupati Kabupaten Kediri dan menjabat selama 2 periode. Untuk melanggengkan dinasti politik di Kabupaten Kediri, keluarga Sutrisno menjalin hubungan dengan elit lokal di Kediri seperti elit partai politik, pimpinan pesantren, dan juga pejabat dalam lingkup pemerintahan desa.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Novendra Bimantara (2018) dengan penulis yang dilakukan adalah sama-sama meneliti dinasti politik dengan model arisan, yang menempatkan istrinya menjadi penerus pertahana. Perbedaan penelitian antara penulis dengan Novendra Bimantara adalah terdapat pada objek penelitian dan permasalahan yang penulis lakukan. Objek penelitian Novendra Bimantara dilakukan di Kabupaten

Kediri, sedangkan penulis di Kabupaten Kuningan. Kemudian di sini penulis akan menyoroti bagaimana persepsi dari masyarakat Kecamatan Kuningan terhadap pilkada Kabupaten Kuningan tahun 2018, sedangkan Novendra Bimantara membahas mengenai bagaimana cara mempertahankan dan cara bekerja dinasti Sutrisno di Kabupaten Kediri.

Penelitian yang ketiga, dilakukan oleh Dina Fadiyah, Rahmi Kania Dewi, dan Ayi Karyaba (2022) dalam jurnal yang berjudul Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda di Kabupaten Kuningan. Di dalam jurnal ini, membahas mengenai bagaimana terbentuknya politik dinasti yang dilakukan oleh Aang Hamid Suganda yang sudah terbentuk selama hampir 20 tahun. Aang Hamid Suganda berhasil membangun dinasti politiknya dilatar belakangi oleh keberhasilannya selama beliau menjabat menjadi Bupati Kuningan. Pada jurnal ini dijelaskan juga sejarah dari Aang Hamid Suganda dan keluarganya yang menjadi orang nomor satu dan dua di Kabupaten Kuningan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan datanya berupa studi literasi dan wawancara. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dina Fadiyah, Rahmi Kania Dewi, dan Ayi Karyaba (2022) dengan penulis ialah sama- sama mengangkat isu dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Yang membedakannya ialah penelitian yang dilakukan oleh lebih lebih ke arah persepsi masyarakat Kecamatan Kuningan terhadap dinasti politik di Kuningan.

Penelitian selanjutnya yaitu skripsi dari Burhanuddin Nur Yozi Rizal dengan judul Persepsi Masyarakat Tentang Politik Dinasti dalam Ranah Politik Lokal di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2019. Metode yang digunakan di dalam skripsi ini menggunakan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya masyarakat Kecamatan Sewon tidak setuju dengan adanya dinasti politik di daerah Bantul. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai dan menyadari dampak yang dihasilkan dari adanya politik dinasti di Bantul sangat merugikan.

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penulis yaitu skripsi yang dibuat oleh Bunga Indah Yani, yang berjudul “Opini Publik dan Dinasti Politik (Studi Atas Persepsi Masyarakat Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Jawa Tengah Terhadap Pencalonan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Dinasti Politik Jokowi Pada Pilkada 2020). Di dalam skripsi ini membahas mengenai persepsi masyarakat di Kelurahan Semanggi, Surakarta atas pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Surakarta pada tahun 2020. Pencalonan Gibran ini tentunya menimbulkan banyaknya persepsi di kalangan masyarakat Kelurahan Semanggi karena adanya indikasi dinasti politik Jokowi. Persepsi masyarakat di Kelurahan Semanggi ini kecewa dan menentang terhadap keputusan pencalonan Gibran sebagai calon Wali Kota Surakarta 2020. Hal ini dikarenakan menurut masyarakat penjaringan Gibran sebagai calon Wali

Kota Surakarta ini dilakukan secara tertutup. Kemudian juga menurut masyarakat pencalonan Gibran ini yang ada akan menguatkan dinasti politik Jokowi setelah sebelumnya sudah ada pencalonan dari menantu Jokowi, Bobby Nasution menjadi calon Wali Kota Medan. Penelitian dari Bunga Indah Yuni ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan 10 narasumber.

Penelitian selanjutnya ialah skripsi yang dibuat oleh Arin Dinda dengan judul Persepsi Masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit Terhadap Program Kerja Ahmadi Zubir dan Alvia Santoni Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang dituangkan di dalam skripsi ini ialah bahwasannya masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit merespon positif terhadap program kerja dari Ahmadi Zubir dan Alvia Santoni. Program kerja dari Ahmadi Zubir dan Alvia Santoni sudah terlaksana cukup baik dengan nilai rata-rata 306, meskipun ada salah satu program yang dirasa tidak baik pada aspek lingkungan. Sementara masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit dimaknai cukup puas terhadap program kerja Ahmadi Zubir-Alvia Santoni dengan nilai keseluruhan 300.

Penelitian selanjutnya ialah, skripsi dari Dina Azahra Putri yang berjudul Persepsi Masyarakat Kota Surakarta Terhadap Dinasti Politik Joko Widodo. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya masyarakat Kota Surakarta tidak memperdulikan adanya dinasti politik Joko Widodo atau merespon positif. Kemudian, pada faktor yang menjadi pengaruh antara persepsi masyarakat Surakarta terhadap dinasti politik sebesar 30,4%.